



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PURJIYANTA**
2. Jabatan : **KEPALA SEKRETARIAT**
3. NHK : **195702**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **279.480.000**

1. Tanah Seluas 222 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 29.780.000
2. Tanah Seluas 777 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 112.000.000
3. Tanah Seluas 230 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 25.200.000
4. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000
5. Tanah Seluas 249 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. Tanah Seluas 727 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **110.000.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 104.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **125.300.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	137.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	58.029.279
Sub Total	Rp.	709.809.279
III. HUTANG	Rp.	20.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	689.809.279

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.